

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Nasional merupakan kegiatan yang berlangsung secara berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara materil maupun spiritual. Dalam usaha mencapai tujuan pembangunan tersebut, pemerintah menciptakan tahapan-tahapan pelaksanaannya, baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek, yang dimana salah satu pendapatan pusat yaitu ada di daerah. Untuk meningkatkan dan menetapkan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, maka dilakukan pendayagunaan aparatur pemerintah, yang pelaksanaannya dan penggunaannya juga diperlukan adanya pengawasan yang efektif dan efisien agar pembangunan nasional berjalan dengan baik.

Pendayagunaan aparatur pemerintah sangat penting dalam pengelolaan pendapatan untuk menggali sumber pendapatan guna membiayai pembangunan. Dalam membiayai pembangunan salah satu upaya pemerintah adalah menyerap dari sektor pajak, meskipun tidak kalah pentingnya pemasukan dari berbagai sektor pendapatan lain. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Dana pembangunan tersebut diperoleh dari sektor perpajakan karena perpajakan merupakan sumber utama pendapatan negara yang mendanai lebih dari 70% belanja negara.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Berbagai kebijakan dalam bentuk ekstensifikasi dan intensifikasi telah dibuat oleh pemerintah untuk mencapai target penerimaan pajak. Kebijakan ini membawa pengaruh terhadap masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak yang berkaitan dengan pajak. Lagipula kesadaran wajib pajak harus ditingkatkan lagi agar penerimaan pajak serta kepatuhan pajak bisa sesuai dengan target yang dibuat. Baik dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang dimana banyak penerimaan pajak dari pusat yang berasal dari daerah.

Selain itu Otonomi daerah memberikan hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diatur dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (yang sudah diamandemen dengan UU No.23 Tahun 2014) dan UU No.33 Tahun 2004. Menurut Halim (2009) ada dua ciri utama sebuah daerah dinilai mampu melaksanakan otonomi daerah yakni kemampuan keuangan daerah dalam menggali dan membiayai kebutuhan pemerintahannya, dan rendahnya ketergantungan daerah kepada bantuan pemerintah pusat.

Berdasarkan Undang-undang No. 33/2004 menyebutkan bahwa salah satu sumber PAD adalah pajak daerah. Disahkan UU No. 28/2009 membuat Pajak Bumi dan Bangunan untuk sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) menjadi Pajak Daerah. Hal tersebut merupakan sebuah perbaruan kebijakan fiskal. Perbaruan kebijakan Fiskal bertujuan mendorong meningkatkan besaran

penerimaan pajak di daerah. Menurut Davey (1988), perbaruan sistem fiskal atau pajak mengandung tiga tujuan pokok yaitu menyederhanakan sistem, menaikkan penerimaan pajak daerah, dan perubahan sistem pajak yang berkaitan dengan wewenang pemerintah daerah.

Juliarini (2012), menyatakan bahwa sebagian besar daerah merasa pesimis dengan pendaerahan PBB P2 dikarenakan administrasi pengelolaannya yang tidak mudah. PBB P2 merupakan jenis pajak yang sulit pengadministrasiannya dan mempunyai efektifitas yang sangat rendah. Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan P2 meliputi kegiatan pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan atau penagihan dan pelayanan PBB P2 (Wahyudi 2012).

Kabupaten Bangka adalah kabupaten yang terletak disebelah timur Sumatera, yang berada di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Luas Pulau Bangka adalah 11.693.54 km². Kabupaten Bangka merupakan salah satu kabupaten yang melakukan pengelolaan pajak PBB P2 tahun 2012 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 12 tahun 2008. Pengelolaan PBB P2 sepenuhnya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah Kabupaten Bangka, sebagai konsekuensinya seluruh penerimaan PBB P2 menjadi PAD Kabupaten Bangka dan tidak ada lagi transfer dana bagi hasil.

Di Kabupaten Bangka terbagi menjadi 8 Kecamatan yaitu Kecamatan Sungailiat, Mendo Barat, Belinyu, Puding Besar, Pemali, Merawang, Riau Silip, dan Bakam. Setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka menjadi pelaksana terlaksananya pemungutan Pajak PBB P2 yang berjalan dengan baik dan sesuai

dengan target yang ditetapkan. Dalam memungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) di kabupaten Bangka terbagi kedalam tiga cara pemungutan yaitu, pertama dengan menggunakan Tim Khusus, kedua dilaksanakan oleh Dinas, dan yang ketiga dipungut oleh juru pungut yang berada di Desa masing-masing. Setiap tahunnya penerimaan Pajak PBB-P2 di Kabupaten Bangka berjalan dengan baik atau ada peningkatan secara baik dan signifikan.

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bangka pada tahun 2016 mencapai 85,6 % dengan target pungutan Rp 6.105.463.505. Sedangkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bangka tahun 2017 mencapai 78,56 % dari target pemungutan Rp 6.540.968.367. Terlihat dari jumlah penerimaan pajak tahun 2016 dan tahun 2017 meningkat cukup baik, walaupun belum mencapai target maksimum penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan.

Dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bangka ada beberapa kendala yang terjadi sehingga penerimaan pajak Bumi dan Bangunan tidak mencapai penerimaan maksimum, yaitu pertama kurangnya pengawasan terhadap pemungut pajak baik pengawasan dalam cara bersosialisasi ke masyarakat ataupun pendekatan secara persuasi, kedua tidak adanya laporan secara jelas wajib pajak yang berdomisili diluar Kabupaten Bangka, sehingga akan sulit ketika pemungut melakukan pungutan pajak ke Wajib Pajak dan wajib pajak tidak berada di tempat, dan yang ketiga kurangnya responsif wajib pajak dalam membayar pajak Sehingga menjadi penghambat dalam capaian target yang telah ditentukan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBB P-2 di Kabupaten Bangka Tahun 2016-2017”.

1.2. Rumuan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana Evaluasi Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Bangka tahun 2016 – 2017?

1.3. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini untuk memberikan ruang lingkup agar pembahasan masalah tidak terlalu luas, maka penelitian ini masalah yang akan dibahas adalah bagaimana Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Bangka tahun 2016 - 2017.

1.4. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan terhadap suatu masalah pasti memiliki suatu tujuan penelitian. Dalam hal ini yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk menganalisis Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten tahun 2016 - 2017.

1.5. Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut:

1. Kontribusi Teoritis

Pengembangan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan studi akuntansi, terutama terkait dengan perpajakan, menambah wawasan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai kesadaran kewajiban perpajakan PBB P2 dan sebagai perbandingan antara teori yang didapatkan dari perkuliahan maupun literatur yang ada dalam penerapannya dengan masalah yang diteliti.

2. Kontribusi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) dalam menerapkan Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bangka.

3. Kontribusi Kebijakan

Penelitian ini bisa dijadikan masukan atau referensi bagi penelitian berikutnya dengan topik yang sama.

1.6. Sistematika Penulisan

Pembahasan dari hasil penelitian ini akan disajikan secara sistematis kedalam beberapa bab yang akan diuraikan sebafei berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini akan membahas mengenai teori-teori yang berhubungan dengan apa yang diteliti, penelitian terdahulu yang pernah dilakukan, dan kerangka berfikir penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini terdiri dari rancangan penelitian, fokus penelitian, tempat dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian berupa analisis data dan interpretasi dan serta keterbatasan penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian serta saran-saran yang perlu disampaikan untuk subyek penelitian.